

Jamin Ketersediaan Ikan Air Tawar di Batam

# TNI AL DAN PEMKO BATAM DUKUNG ASPERIKAT

**P**emerintah Kota (Pemko) Batam mendukung usaha kelompok pembudidaya ikan air tawar di Kota Batam. Dukungan itu disampaikan saat meresmikan Aspirasi Pengusaha dan Peternak Ikan Air Tawar (Asperikat) di Tiban, Sekupang, Rabu (7/3) pagi.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyerukan seluruh instansi terkait untuk mendukung pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dalam hal ini Asperikat dalam pembudidayaan ikan air tawar.

Bagaimanapun, kata Amsakar, pembudidayaan ikan air tawar di Kota Batam sangat dibutuhkan untuk menjamin ketersediaan kebutuhan pangan, dalam hal ini kebutuhan ikan air tawar.

"Di sisi lain kita juga bangga, sebab dengan adanya usaha bapak ibu dari Asperikat ini

bisa menekan inflasi karena ketergantungan dengan daerah lain bisa dikurangi," ujar Amsakar.

Sebagai komitmen dukungannya tersebut, pada kesempatan itu Amsakar langsung menyerukan kepada sejumlah kepala dinas terkait untuk ambil bagian mendukung usaha anggota Asperikat itu.

"Ada Pak Suleman Nababan (Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam) di sini. Saya perintahkan untuk pikirkan usaha rekan-rekan (Asperikat) ini. Begitu juga Pak Zarefriadi (Kadisperindag) pikirkan pemasarannya, Pak Alwi (Sekretaris Dinas Perikanan Kota Batam) untuk pikirkan pakannya. Kalian harus berembung untuk mendukung usaha saudara-saudara kita ini," seru Amsakar.

Danlanal Batam Kolonel (E)

Iwan Setiawan sebagai pembina Asperikat memberikan apresiasi atas dukungan Wakil Wali kota Batam. Dia berharap Pemko punya terobosan sendiri dengan mengeluarkan kebijakan yang tidak mempersulit pelaku usaha peternak ikan air tawar yang sudah dibentuk itu.

"Batam punya potensi besar pak untuk budidaya ikan air tawar ini. Dari tahun ke tahun terus meningkat pembudidaya ikan air tawar. Ini harus benar-benar diperhatikan agar bisa menjamin kebutuhan pangan khususnya perikanan air tawar di Kota Batam ini," ujar Iwan.

Ketua Asperikat Batam Sugito menuturkan, Asperikat merupakan kumpulan pengusaha dan pembudidaya ikan air tawar untuk menyatukan persepsi dalam menjamin ketersediaan ikan air tawar di Batam. Melalui

asosiasi ini, pengusaha dan pembudidaya ikan air tawar akan sepaham terkait bagaimana cara membudidaya yang baik hingga pada tahap pemasarannya.

"Ini terobosan yang bagus agar tak ada lagi tumpang tindih antara pembudidaya dan pengusaha. Pembudidaya menyediakan stok ikan, pengusaha yang menjual atau mengolah jadi bahan pangan. Antara pembudidaya dan pengusaha saling kontrol, sehingga tak ada lagi mafia, monopoli, dan lain sebagainya," tutur Sugito.

Saat ini, Asperikat sudah memiliki 120 anggota dan sekitar 300 anggota lain akan segera bergabung.\*\*\*

FOTO: DALIL HARAHAP

NARASI : EUSEBIUS SARA



WAKIL Wali Kota Batam Amsakar Achmad memberikan sambutan.



DANLANAL Batam Kolonel (E) Iwan Setiawan memberikan sambutan.

# Sukseskan Pemilu 2019

## PPK dan PPS Batam Dilantik

**BATAMKOTA (BP)** - Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Batam pada Pemilihan Umum Tahun 2019 resmi dilantik, Rabu (7/3) di Hotel Harmoni One, Batamcentre. Pelantikan yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam Agus Setiawan disaksikan Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

PPK setiap kecamatan terdiri dari tiga orang anggota, begitu juga dengan anggota PPS dari masing-masing kelurahan beranggotakan tiga orang. Sehingga PPK yang dilantik berjumlah 36 orang dan 192 PPS se-Kota Batam.

Ketua KPU Kota Batam Agus Setiawan mengungkapkan bahwa anggota PPK dan PPS terpilih berdasarkan supervisi dan silaturahmi yang dilakukan lima orang komisioner KPU Kota Batam ke camat dan lurah se Kota Batam.

Perekrutan anggota PPK dan PPS pada pelaksanaan Pemilu 2019 ini menurutnya berbeda dengan pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Pada pelaksanaan Pemilu 2019, Anggota PPK dan PPS langsung mendaftar ke KPU Kota Batam untuk menjadi penyelenggara Pemilu.

■ Baca **SUKSESKAN**...Hal 13

**WALI** Kota Batam Muhammad Rudi memberikan selamat kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Batam usai pelantikan di Hotel Harmoni One, Batamcentre, Rabu (7/3).



# Sukseskan Pemilu 2019

*Sambungan dari hal 9*

“Camat dan lurah telah menempatkan pengumuman di kantor, sehingga seluruh masyarakat memiliki peluang yang sama untuk duduk sebagai penyelenggara Pemilu. Terima kasih kepada bapak dan ibu camat serta lurah yang telah membantu kami dalam merekrut anggota PPK maupun PPS,” ucapnya.

Meski anggota PPK dan PPS yang dilantik kebanyakan wajah baru, Agus yakin mereka mampu untuk bekerja dan bersinergi dengan camat dan lurah. Ia berpesan kepada anggota PPK dan PPS yang baru dilantik untuk tidak sombong, karena masa kerja hanya sampai bulan September. Jika dilakukan evaluasi

maka anggota PPK maupun PPS yang dianggap tidak layak mau tidak mau tidak bisa bekerjasama dan akan diganti. Ia mengajak agar anggota PPK dan PPS yang dilantik dapat menyukseskan pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April 2019 mendatang.

“Kerja cukup berat karena terkait dengan pemuktahiran data. Jika PPS dan PPK tidak bisa berkomunikasi dengan perangkat RT/RW, camat dan lurah maka dianggap gagal. Terlebih saat ini sudah ada forum RT/RW dan mereka minta dilibatkan dalam melakukan pemuktahiran data. Untuk itu jangan tinggalkan mereka karena mereka yang mempunyai wilayah dan warga. Sangat fatal jika anggota PPK dan PPS tidak bisa

bekerjasama dengan perangkat daerah setempat,” jelasnya.

Ketua KPU Provinsi Kepri Said Sirajudin berpesan agar anggota PPK dan PPS terpilih dapat bekerja sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Bagaimana sebagai anggota PPK dan PPS bekerja tidak diintervensi oleh siapapun juga.

“Sebagai anggota PPK dan PPS kita dituntut bekerja secara profesional, integritas sehingga dapat menjaga nama baik pribadi maupun lembaga. Yakinkan kepada masyarakat bahwa kita bisa bekerja untuk menyukseskan Pemilu 2019 mendatang,” katanya.

Wali Kota Batam Muham-

mad Rudi menyampaikan ucapan selamat kepada anggota PPK dan PPS yang baru saja dilantik. Sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap suksesnya pelaksanaan Pemilu di Kota Batam, Rudi ingin Batam menjadi contoh suksesnya pelaksanaan Pemilu pada 2019 mendatang. Untuk mendukung kepemimpinannya, ia mengatakan bahwa dibutuhkan anggota DPRD yang mempunyai visi dan misi sesuai dengannya.

“Batam butuh pemimpin yang betul-betul ingin membangun kota ini dengan jujur dan penuh keberanian. Jika pelaksanaan Pemilu ini berhasil maka berhasillah saya sebagai pemimpin daerah,” sebutnya. (ryh)

# Dishub Belum Keluarkan Izin

## Perusahaan Transportasi Online Bertambah

**TANJUNGPINANG (BP)** - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kepri Jamhur Ismail mengatakan beberapa hari belakangan ini, jumlah perusahaan yang mengajukan izin transportasi berbasis aplikasi terus bertambah. Sedangkan untuk penentuan kuota belum ada perubahan rencana.

“Dari 16 perusahaan yang mengajukan izin, dua perusahaan dinyatakan lengkap. Tetapi belum kita keluarkan surat izinnya. Karena proses penentuan kuota belum rampung,” ujar Jamhur di Tanjungpinang,



F. JAILANI/BATAM POS

**Jamhur Ismail**

# Dishub Belum Keluarkan Izin

Sambungan dari hal 9

Rabu (7/3). Menurutnya, proses penentuan kuota taksi *online* rampung pada Juni mendatang. Sedangkan jumlahnya tetap mengacu pada perhitungan kasar yang sudah ada. Jika jumlah tersebut nanti yang ditetapkan, maka akan dibagi kepada 16 perusahaan yang sudah mengajukan izin.

"Kita berharap perusahaan yang belum melengkapi syarat administrasinya untuk segera melengkapi. Karena kuota itu nanti akan dibagi-bagi kepada perusahaan yang memenuhi syarat saja," tegas Jamhur.

Dikatakannya juga, belum lama ini, Komisi III DPRD Kepri bersama Dishub Kepri juga mendatangi Kement-

rian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendesak penuntasan polemik transportasi *online* yang terjadi di Batam. Ia berharap, semua pihak bisa saling menjaga kondusifitas Batam.

"Sekarang tahun politik, kita khawatir pertikaian yang berlanjut akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kondusifitas daerah. Apalagi sampai dipolitisir untuk kepentingan tertentu," tegasnya lagi.

Ditambahkan Jamhur, polemik transportasi *online* bukan hanya terjadi di Kepri. Karena persoalan yang sama, juga terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Dijelaskannya, solusi untuk mengakhiri konflik sementara adalah berada di Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

"Kita sudah menyampaikan tuntutan ke Kemenkominfo. Tetapi sampai sekarang ini, belum ada respons yang baik mereka berikan," tutup Jamhur.

Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho membenarkan, pihaknya sudah mendatangi Kemenhub untuk mempertanyakan soal transportasi *online*. Politisi PDI Perjuangan tersebut mengaku cemas jika polemik terus berlanjut. Maka akan memberikan konsekuensi buruk bagi Batam.

"Sampai sejauh ini, Batam masih menjadi andalan kekuatan ekonomi Provinsi Kepri. Jika kondusifitas Batam terus diganggu, maka pengaruhnya akan sangat besar bagi daerah-daerah lain di Kepri," ujar Widiastadi, kemarin. (jpg)

# Kios Pedagang Harus Dibongkar

## TENAGA KERJA

### Batam Aman dari Serbuan TKA Tiongkok

BATAMKOTA (BP) - Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam Rudy Sakyakirti memastikan Kota Batam aman dari serbuan tenaga kerja asing (TKA), utamanya dari Tiongkok. Jumlah TKA Tiongkok tahun ini juga jauh berkurang. Itu terjadi sejak beberapa tahun terakhir. "Jumlah mereka saat ini (di Batam, red) berkurang dibandingkan tahun 2016 lalu," terang Rudi, Rabu (7/3).

Menurut dia, kondisi Batam jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia seperti di Jawa. Apalagi saat ini, kondisi industri di Batam belum ada perkembangan, sehingga proyek usaha berkurang. "TKA Tiongkok biasa bekerja berdasarkan proyek, nah, di Batam saat ini proyek sedang sepi. Pokoknya Batam tak sama dengan daerah lain," tegas Rudy.

Dijelaskannya, jumlah pekerja asing di Batam jauh menurun sejak ekonomi di Batam lesu. Mereka yang bekerja pun diwajibkan memiliki keterampilan untuk satu profesi, bukan sebagai operator. "Jadi yang bekerja di sini (Batam, red) punya skill semua. Seperti di Tanjungkasam itu masih ada TKA Cina, rata-rata mereka bekerja di bagian teknisi," imbuh Rudy.

Mengenai pengawasan TKA di Batam, kata dia, merupakan tanggung jawab Provinsi Kepri. Pihaknya hanya menopang jika ada laporan terkait TKA di perusahaan-perusahaan. "Kalau ada pengawasan kami hanya mendampingi," pungkas Rudy. (she)

## Butuh Rp 150 Miliar Bangun Pasar Induk Jodoh

YASHINTA-ADIANSYAH,  
Batuampar

PULUHAN pedagang di kawasan Pasar Induk Jodoh, Batuampar, akan segera ditertibkan karena membuat bagian luar dan dalam pasar semakin kumuh. Penertiban juga terkait rencana pembenahan pasar tersebut setelah resmi dilimpahkan ke Pemko Batam.

Kabid Ketenteraman dan Ketertiban Satpol PP Kota Batam Imam Tohari mengatakan, Tim Terpadu sudah melayangkan surat peringatan (SP) 1 kepada seluruh pedagang di kawasan tersebut. SP 1 itu meminta agar pedagang membongkar kios-kios yang berdiri di pinggir jalan.

"SP 1 baru kami layangkan hari ini (kemarin, red). SP 1 ini berlaku untuk seluruh pedagang baik bagian luar maupun dalam pasar induk yang dijadikan gudang," terang Imam.

Menurut dia, kesemrawutan pasar induk kerap dikeluhkan warga dan pengendara bermotor yang melewati jalur tersebut. Karena itu, Tim Terpadu lebih dulu memberi peringatan, meski perbaikan kawasan pasar induk belum diketahui kejelasannya.

"Sudah banyak yang mengeluh, makanya kami tertibkan. Ada sekitar 89 pedagang, mulai dari kios-kios buah di pinggir jalan hingga penjual ayam di bagian dalam kawasan pasar induk," jelasnya.

Disinggung kapan penertiban, Imam mengaku belum tahu. Hanya saja, setelah SP 1 maka akan ada SP 2 dalam waktu dekat. "Jadwal ditentukan Tim Terpadu," imbuhnya.

### Dibangun Lima Lantai

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam tengah mempersiapkan proposal desain Pasar Induk Jodoh, Batuampar. Kepala Disperindag Batam Zarefriadi memperkirakan kebutuhan anggaran pembangunan pasar ini sebesar Rp 150 miliar. "Sampai selesai, kami gambarkan butuh sekitar Rp 150 miliar," kata Zarefriadi di Gedung Bersama Pemko Batam, Rabu (7/3).

Dalam draf desain di proposal tersebut, pasar ini tergambar dalam lima lantai dengan lantai paling atas difungsikan untuk pusat kuliner terbuka. "View-nya langsung kelihatan Singapura dan daerah seputar Jodoh-Nagoya," ucapnya.

Ia menyampaikan, pembangu-



DERETAN kios pedagang buah berjejer di row jalan depan Pasar Induk Jodoh, Rabu (7/3). Tim Terpadu Batam sudah mengirimkan SP 1 untuk kios-kios tersebut.

nan pusat niaga yang akan menampung pedagang kaki lima se-Batam ini tak sekadar lokasi belanja, namun akan jadi destinasi wisata baru. "Pada malam-malam tertentu seperti tahun baru, pasti sangat ramai," imbuhnya.

Ia menyampaikan, pembangunan kelak akan dikerjakan oleh Dinas Cipta Karya. Sementara wilayah Disperindag seperti dalam lingkup penyiapan desain dan lain hal sebelum dibangun. "Jangan kira hanya Dispe-

rindag, pembangunannya terintegrasi beberapa dinas," terangnya. Ia menegaskan, progres persiapan masih sebatas proposal, artinya desain belum dilakukan karena anggaran.

Alasan anggaran belum dikucurkan karena peralihan aset belum resmi dilakukan antara BP Batam dan Pemko Batam walau kesepakatan di antara kedua lembaga sudah ada. "Makanya perkiraan peralihan rampung di pertengahan tahun

ini kan," kata dia.

Ia mengungkapkan, jumlah tingkat bangunan pasar tersebut masih terus akan dikembangkan dan dilakukan berdasarkan kemampuan anggaran. Menurutnya, harapan Wali Kota Batam Muhammad Rudi jika dimungkinkan akan dibangun tujuh tingkat. "Pak Wali memang pandangan jauh ke depan, ini memang rencana kami. Idealnya paling minimal sebenarnya 10 lantai," kata dia. \*\*\*

# Gedung SDN 008 Batuaji Jadi Prioritas

## Usulan Diminta Terus Digaungkan

**BATUAJI (BP)** - Desakan masyarakat agar pembangunan gedung SDN 008 Batuaji disegerakan direspon Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Pemko berjanji memprioritaskan agar tak menumpang lagi di gedung SDN 002.

"Peluang lolos besar. Itu sudah jadi pembahasan serius kami agar dianggarkan di APBD 2019," ujar Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat menghadiri peresmian Aspirasi Pengusaha dan Peternak Ikan Air Tawar (Asperikat) di Tiban, Sekupang, Rabu (7/3) pagi.

Amsakar mengatakan, usulan percepatan pembangunan tersebut sudah masuk saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan hingga Kecamatan Batuaji. Namun ia tetap meminta masyarakat untuk terus menggaungkan.

"Di rencana kerja (renja) Dinas Pendidikan (Kota Batam) serta di pokok pikiran Dewan (DPRD Kota Batam) harus disuarakan juga. Kalau tiga-tiganya (termasuk Musrenbang) sama-sama disuarakan, tentu lebih besar lagi peluangnya," pinta Amsakar.

Dia mengakui kebutuhan gedung SDN 008 di Batuaji sangat mendesak. Sebab, sudah empat tahun belakangan ini sekolah yang dikepalai oleh Kamaliah itu belum memiliki gedung sendiri dan masih numpang belajar. Namun, prosedur usulan pembangunan tetap harus dipenuhi dan diperjuangkan secara bersama.

"Karena setiap kecamatan ada usulan serupa. Pada prinsipnya kita akan akomodir tapi itu tadi, prosedur dan tata caranya harus benar-benar diperjuangkan," ujarnya.

Terkait persoalan lahan yang menjadi kendala utama, Pemko Batam akan menemui Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk sama-sama mencari lahan yang tepat. "Lahan sedang kami bahas. Dalam proses pengurusan, semoga secepatnya ada titik terang," tuturnya.

Seperti diketahui, SDN 008 Batuaji yang berdiri sejak 2014 masih numpang belajar di gedung SDN 002. "Lokal yang tersedia hanya dua, padahal ada delapan rombongan belajar, jadi harus tiga shift belajar," ujar Kamaliah. (eja)

# Pencetakan e-KTP Dipercepat

## Jelang Pileg 2019

**SEKUPANG (BP)** - Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad meninjau pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam di Sekupang, Rabu (7/3). Ia mengatakan, saat ini Pemko Batam terus berupaya menyelesaikan tumpukan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang ada di lima kecamatan yang masih belum dicetak. "Informasi yang saya terima sudah 61 ribu keping e-KTP yang sudah selesai dicetak," kata Amsakar usai meninjau Kantor Disdukcapil Batam.

Ia mengaku bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan keterlambatan e-KTP mereka yang belum



F. CECEP MULYANA/BATAM POS

**PETUGAS** Kecamatan Batamkota saat merapikan e-KTP milik warga yang sudah dicetak, Jumat (23/2) lalu.

selesai dicetak. Menurutnya, penyelesaian pencetakan terus dikebut guna merespons harapan masyarakat Batam. "Bertahap kami akan menyelesaikan tumpukan yang ada.

Kami menargetkan Mei ini seluruhnya bisa selesai," ujar mantan Kepala Dinas KUKM Kota Batam ini.

Ia menjamin, untuk pengajuan e-KTP tidak ada masalah

selagi dokumen yang diserahkan jelas dan sesuai. Penambahan 16 ribu keping blangko ini akan digunakan untuk menyelesaikan pembuatan e-KTP warga Batamkota dan Sagulung. "Sementara untuk kecamatan lain menunggu penambahan blangko selanjutnya," imbuhnya.

Amsakar berharap, masyarakat bisa bersabar menunggu, terutama untuk kecamatan yang belum mendapatkan pelayanan pencetakan e-KTP. Semua operator tengah bekerja dan menggesa penyelesaian pencetakan 16 ribu blangko yang baru datang ini.

Percepatan ini juga guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) April mendatang. Karena pemilih harus memiliki e-KTP agar bisa menunaikan haknya memilih wakil rakyat. "Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik, dan kami bisa

mencapai target penyelesaian pencetakan e-KTP," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kota Batam Said Khaidar mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mengebut penyelesaian 16 ribu e-KTP untuk Kecamatan Sagulung dan Batamkota. "Seluruh operator lembur agar bisa menyelesaikan pencetakan," kata dia. (yui)

### PENGUMUMAN

Telah hilang barang penting berupa, yaitu:

1 (satu) lembar Gambar Penetapan Lokasi (PL) asli atas nama **AMISMADI**, dengan nomor **PL : 28030619**, tanggal 05 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh **OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM**.

Bagi yang menemukan berkas tersebut di atas mohon hubungi **AMISMADI**, dengan nomor : **081277250008**

# Pematangan Lahan Rusak Drainase

**BATUAJI (BP)** - Banyaknya aktivitas proyek pematangan lahan di Batuaji membuat alur drainase rusak dan menyempit. Air buangan rumah tangga maupun air hujan tak meluap ke badan jalan dan berpotensi banjir.

Seperti yang terjadi di Perumahan Tembesi Raya, Batuaji. Warga setempat mempersoalkan salah satu pengembangan yang menimbun alur drainase di perumahan mereka karena membangun akses jalan masuk melalui pinggir drainase. Warga khawatir, lingkungan mereka kebanjiran karena drainase yang menjadi saluran pembuangan itu dipersempit. "Ukuran drainase sebelumnya 3 meter, tapi karena ditimbun pengembang, ukurannya jadi tak lebih dari 1 meter," ujar Eben Ezer Simangunsong, Ketua RW 20 Perumahan Tembesi Raya, Rabu (7/3).

Selain itu, warga juga mengeluhkan elevasi timbunan dengan jalan yang ada di perumahan mereka. Dimana,

timbunan tersebut lebih tinggi dari pada jalan maupun drainase. "Kalau hujan, rumah kami kena dampaknya. Apalagi timbunan itu belum ada penahannya, kalau hujan kan bahaya juga," katanya.

Karena kondisi itu, beberapa waktu lalu warga setempat sempat melakukan aksi protes dengan mengadakan dan menghentikan proyek. Beruntung, proyek tersebut langsung diberhentikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam yang langsung turun tangan untuk menyelidiki kerusakan lingkungan. "Proyek berhenti, tapi masalah drainase kami belum selesai," jelasnya.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan pembangunan tersebut.

"Kami tidak menghalangi pembangunan, tapi jangan sampai kami jadi korban juga," ungkapnya.

Warga Lain, Suhartini juga mengaku kesal atas ulah pengembang tersebut. "Maunya di keruk lagi seperti semula," pintanya. **(une)**

## Batam Minim Rumah Adat Melayu

**BATAMKOTA (BP)** - Rumah adat khas Melayu yakni Rumah Limas Potong di Batam sulit ditemui.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Pebrialin menyebutkan, bahkan satu-satunya rumah Melayu yang kini dalam pengelolaan Pemerintah Kota (Pemko) Batam hanya satu, yakni di Kampung Melayu Batubesar, Nongsa. "Kami harap di lokasi lain masih ada, sejauh ini kami belum deteksi. Tapi kami yakin, masih ada di tempat lain," ujar Pebrialin, kemarin.

Ironisnya, rumah yang tepat berdiri di ujung RT 01 RW 08

tersebut bukan milik Pemko Batam. Dengan kata lain, rumah tersebut merupakan milik warga. "Rumah itu dimiliki pihak ketiga, tapi bisa dimanfaatkan pemerintah kok," ucapnya.

Namun demikian, menurut Pebrialin, Pemko Batam berencana membangun Rumah Limas Potong di beberapa titik. "Salah satunya di Kebun Raya Batam," ujarnya.

Selain di lokasi tersebut, titik lain seperti di beberapa kampung tua di Batam juga akan dibangun rumah adat tersebut. "Tidak semua, kami akan kaji dulu," imbuhnya. **(adi)**